RENJA PERUBAHAN
2026

BADAN PENGELOLA PERBATASAN
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 telah selesai disusun. Dokumen ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan program serta kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, dengan menyesuaikan arah kebijakan, kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan, serta hasil evaluasi pelaksanaan RENJA sebelumnya.

Penyusunan RENJA Perubahan BPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.

RENJA Perubahan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 dan menjadi arah, pedoman, sekaligus motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur BPPD Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Nunukan,13 Juli 2026
Kepala Badan

ROBBY NAHAK SERANG,S.H
NIP. 19660814 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. Landasan Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA BPPD Kabupaten Nunukan 3
D. Sistematika Penulisan 3
BAB II 5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEMESTER I 2026 5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III 8
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH (PERBUBAHAN) 8
A. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan 8
B. Program Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025
C. Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025

BAB IV 11
PENUTUP 11

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. RENJA PD berfungsi sebagai dokumen rencana resmi yang mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah, sekaligus menjadi masukan utama bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Pasal 343 ayat (1) ditegaskan bahwa RKPD dan RENJA PD dapat dilakukan perubahan apabila dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bappeda Litbang mengamanatkan agar setiap perangkat daerah menyusun RENJA Perubahan Tahun 2026 dengan tetap mempedomani pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang merupakan pelaksanaan visi, misi, dan program Kepala Daerah periode 2025–2030.

RENJA Perubahan BPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BPPD Tahun 2025–2029, dengan penyesuaian pada tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan, serta kebutuhan pagu anggaran. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus motivasi peningkatan kinerja aparatur BPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan daerah.

B. Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Unddang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanng Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang rencana Strategis Sekrtetariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020-2024;
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10, no.Reg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 56/J20/2018;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11);
o. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
q. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA BPPD Kabupaten Nunukan

1. Maksud

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memberikan arah kebijakan, strategi, serta sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan.

Secara lebih rinci, maksud penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2026 meliputi: merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah; menetapkan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja; menentukan tolak ukur dan target capaian kinerja, baik keluaran maupun hasil, termasuk lokasi serta kelompok sasaran; memproyeksikan kebutuhan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya; serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD agar tercipta kesesuaian dan keserasian antara perencanaan dan penganggaran.

2. Tujuan

penyusunan RENJA Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan arah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara nyata dan konkret ke dalam program-program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun. RENJA yang disusun diharapkan dapat mendeskripsikan program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, melaksanakan program sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, serta memastikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusuna RENJA Perubahan 2026 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026 dan Capain Kinerja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH (PERUBAHAN)

A. Program Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026
B. Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026

BAB IV PENUTUP

Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SEMESTER I 2026

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Semester I Tahun 2026 dan Ketercapaian RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan wajib dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan capaian kinerja yang diperoleh, serta mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyesuaian.

Evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Semester I Tahun 2026 dilakukan untuk melihat sejauh mana target kinerja dapat dicapai sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029.

Perkiraan pencapaian kinerja Semester I Tahun 2026 disajikan dalam bentuk tabel yang memuat indikator kinerja, target, realisasi, capaian, serta rekomendasi tindak lanjut. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan RENJA Perubahan Tahun agar lebih sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**			**29.234.571.248**		**4.529.261.959**		**7.475.256.496**		**1.280.787.211**		**1.785.903.627**						**3.066.690.838**		**3.066.690.838**	**344,48**	**10,49**		
		5.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.833.117.077**		**3.903.319.927**		**5.052.622.906**		**1.280.787.211**		**1.566.354.844**						**2.847.142.055**		**2.847.142.055**	**654,27**	**15,97**	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	100		93		100		17,13								17,13		17,13		17,13			
		5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			545.000.000		72.235.505		34.682.000		-		18.118.715						18.118.715		18.118.715	500	3,32		
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		5		2		0		100						100		100		1000			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		1		0		0						0		0		0			
		5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			235.000.000		29.708.650		18.256.000		-		18.118.715						18.118.715		18.118.715	1000	7,71		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		5		2		0		100						100		100		1000			
		5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			310.000.000		42.526.855		16.426.000		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		1		0		0						0		0		0			
		5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.126.097.192		3.024.840.512		3.624.922.136		957.421.266		1.048.194.660						2.005.615.926		2.005.615.926	48,11	16,54		
			Jumlah bulan penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	115		19		22		19		55,33						55,33		55,33		48,11			
		5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.126.097.192		3.024.840.512		3.624.922.136		957.421.266		1.048.194.660						2.005.615.926		2.005.615.926	48,11	16,54		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	115		19		22		19		55,33						55,33		55,33		48,11			
		5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		56.250.000		-		55.500.000						55.500.000		55.500.000	0	0		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		1		0		100						100		100		0			
		5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		56.250.000		-		55.500.000						55.500.000		55.500.000	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		1		0		100						100		100		0			
		5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.686.019.885		368.038.990		632.826.570		180.557.530		224.171.718						404.729.248		404.729.248	888,9	15,07		
			Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		32,64						32,64		32,64		652,8			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		2		71,43						73,43		73,43		1468,6			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35		4		7		0		48,29						48,29		48,29		137,97			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0		27,35						27,35		27,35		547			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		3		1		2		39,35						41,35		41,35		827			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		12		2		83						85		85		1700			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			80.000.000		-		32.450.700		-		10.592.730						10.592.730		10.592.730	652,8	13,24		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		32,64						32,64		32,64		652,8				
		5.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			249.646.214		-		261.607.560		30.513.900		104.159.070						134.672.970		134.672.970	1468,6	53,95		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		2		71,43						73,43		73,43		1468,6				
		5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			135.000.000		15.936.976		19.894.545		-		9.607.050						9.607.050		9.607.050	137,97	7,12		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35		4		7		0		48,29						48,29		48,29		137,97				
		5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			85.000.000		1.335.000		9.181.455		-		2.510.820						2.510.820		2.510.820	547	2,95		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0		27,35						27,35		27,35		547				
		5.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			546.000.000		144.656.966		25.043.310		6.849.630		3.004.215						9.853.845		9.853.845	827	1,8		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		3		1		2		39,35						41,35		41,35		827				
		5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.590.373.671		206.110.048		284.649.000		143.194.000		94.297.833						237.491.833		237.491.833	1700	14,93		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		12		2		83						85		85		1700				
		5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.018.000.000		407.747.054		518.273.200		109.624.825		147.500.251						257.125.076		257.125.076	386,11	12,74		
			Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		2		25						27		27		45				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		3		1		1		50						51		51		1020				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		10		12		6		50						56		56		93,33				
		5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.000.000		5.386.754		90.000.000		7.546.300		331.771						7.878.071		7.878.071	45	13,13		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		2		25						27		27		45				
		5.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			160.000.000		13.930.500		38.950.000		6.000.000		-						6.000.000		6.000.000	1020	3,75		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		3		1		1		50						51		51		1020				
		5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.798.000.000		388.429.800		389.323.200		96.078.525		147.168.480						243.247.005		243.247.005	93,33	13,53		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		10		12		6		50						56		56		93,33				
		5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			458.000.000		30.457.866		185.669.000		33.183.590		72.869.500						106.053.090		106.053.090	810	23,16		
			Aset tetap dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		3		1		1		25						26		26		0				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0				
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		1		80						81		81		1620				
		5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		30.457.866		40.669.000		3.300.000		3.720.000						7.020.000		7.020.000	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		3		1		1		25						26		26		0			
		5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			185.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			273.000.000		-		145.000.000		29.883.590		69.149.500						99.033.090		99.033.090	1620	36,28		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		1		80						81		81		1620			
		5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			**11.185.118.000**		**625.942.032**		**2.422.633.590**		**-**		**219.548.783**						**219.548.783**		**219.548.783**	**245,34**	**1,96**	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
			Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase peningkatan potensi unggulan kawasan perbatasan (%)	2,6		91		0,48		0								0		0		0			
		5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			3.818.000.000		247.951.340		1.061.064.350		-		27.898.002						27.898.002		27.898.002	43,63	0,73		
			Terlaksananya Fasilitasi dan Kerjasama Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	10		6		1		0		0,46						0,46		0,46		4,6			
				Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	6		8		1		0		4,96						4,96		4,96		82,67			
		5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			2.034.000.000		109.380.705		548.979.390		-		2.517.000						2.517.000		2.517.000	4,6	0,12		
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	10		6		1		0		0,46						0,46		0,46		4,6			
		5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			1.784.000.000		138.570.635		512.084.960		-		25.381.002						25.381.002		25.381.002	82,67	1,42		
			Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	6		8		1		0		4,96						4,96		4,96		82,67			
		5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			4.797.118.000		191.752.230		1.003.263.660		-		42.831.303						42.831.303		42.831.303	38,84	0,89		
			Terlaksananya Fasilitasi di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		0		0		3,47						3,47		3,47		69,4			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0		6,24						6,24		6,24		124,8			
				Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	5		8		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0			
		5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			623.000.000		5.260.000		713.101.940		-		24.726.303						24.726.303		24.726.303	69,4	3,97		
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		0		0		3,47						3,47		3,47		69,4			
		5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			623.000.000		10.077.600		290.161.720		-		18.105.000						18.105.000		18.105.000	124,8	2,91		
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0		6,24						6,24		6,24		124,8			
		5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara			2.035.000.000		155.314.630		-		-		-						-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	5		8		1		0		0						0		0		0			
		5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah			893.118.000		9.400.000		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0			
		5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota			623.000.000		11.700.000		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0			
		5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan			2.570.000.000		186.238.462		358.305.580		-		148.819.478						148.819.478		148.819.478	963,3	5,79		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		3		1		0		50						50		50		1000			
				Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		6		1		0		46,33						46,33		46,33		926,6			
		5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			1.285.000.000		73.574.000		258.253.080		-		102.466.775						102.466.775		102.466.775	1000	7,97		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		3		1		0		50						50		50		1000			
		5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			1.285.000.000		112.664.462		100.052.500		-		46.352.703						46.352.703		46.352.703	926,6	3,61		
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		6		1		0		46,33						46,33		46,33		926,6			
		5.06.03	**PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA**			**216.336.171**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**		**-**	**0**	**0**	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
			Meningkatnya pembagunan kawasan perbatasan negara	Persentase infrastruktur perbatasan berkondisi baik (%)	100		0		20		0								0		0		0			
		5.06.03.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama			23.336.171		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Jumlah Fasilitasi Kerjasama dan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan di Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.01.0001	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara			23.336.171		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.02	Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara			113.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Jumlah Fasilitasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.02.0001	Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.02.0003	Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.02.0005	Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara			28.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.02.0006	Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.02.0007	Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara			25.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.03	Monitoring dan Evaluasi			60.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.03.0001	Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.03.0002	Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.03.0003	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.04	Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.06.03.2.04.0001	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0			
				JUMLAH		**29.234.571.248**		**4.529.261.959**		**7.475.256.496**		**1.280.787.211**		**1.785.903.627**						**3.066.690.838**		**3.066.690.838**				
				Rata-rata capaian kinerja (%)																			**344,48**	**10,49**		
				Predikat kinerja																			**Sangat tinggi**	**Sangat Rendah**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan

Dalam rangka menjabarkan misi dan sasaran RPJMD Perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan:

1. Tujuan SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan

a. Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan ;

2. Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan

Sasaran adalah rumusan kondisi yyang meggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan terhadap perubahan RPKMD Kabupaten Nunukan tahun 2026 tersebut diatas, ditetapakn sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya pelayanan dasar pengelolaan kawasan perbatasan
b. Nilai sakip

Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, yang dilengkapi dengan indikator kinerja disajikan dalam table dibawah ini :

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	METODOLOGI	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Dasar Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks Dimensi Ekonomi (Indeks)	IDE=Skor Produksi+Skor Perdagangan+Skor UMKM+Skor Investasi+Skor Lapangan Kerja/5	Ukuran Komposit Yang Menggambarkan Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal.	pengukuran dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sektor ekonomi perbatasan, seperti produksi, perdagangan, UMKM, investasi, dan lapangan kerja. Setiap sektor diberi skor berdasarkan capaian aktual yang diperoleh dari survei lapangan maupun data sekunder OPD teknis. Skor tersebut kemudian dirata-ratakan sehingga menghasilkan indeks komposit yang mencerminkan kondisi ekonomi kawasan perbatasan secara menyeluruh.	1. BNPP 2. OPD Teknis	BPPD
		Indeks Dimensi Infrastruktur (Indeks)	IDI=Skor Transportasi+Skor Energi+Skor Telekomunikasi+Skor Air Bersih+Skor Fasilitas Publik/5	Ukuran Komposit Yang Digunakan Untuk Menilai Sejauh Mana Pengelolaan Kawasan Perbatasan Berhasil Meningkatkan Ketersediaan, Kualitas, Dan Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Maupun Penunjang Pembangunan.	penilaian terhadap ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar maupun penunjang. Data dikumpulkan dari sektor transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, dan fasilitas publik. Setiap aspek diberi skor sesuai standar pelayanan minimal atau capaian pembangunan, lalu dihitung rata-rata untuk menghasilkan indeks infrastruktur. Dengan cara ini, indeks mampu menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan fisik di kawasan perbatasan.	1. BNPP 2. OPD Teknis	BPPD
		Indeks Dimensi Tata kelola (Indeks)	IDTK=Skor Koordinasi+Skor Transparansi+Skor Akuntabilitas+Skor Efektivitas+Skor Partisipasi/5	Ukuran Komposit Yang Digunakan Untuk Menilai Kualitas Tata Kelola Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Indeks Ini Menggambarkan Sejauh Mana Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Diterapkan Oleh Pemerintah Daerah, Meliputi Koordinasi Lintas Instansi, Transparansi Informasi, Akuntabilitas Pelaksanaan.	pengukuran dilakukan dengan menilai praktik tata kelola pemerintahan daerah melalui indikator koordinasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Data diperoleh dari dokumen perencanaan, laporan kinerja, serta hasil evaluasi BNPP dan OPD teknis. Skor tiap aspek dihitung berdasarkan kualitas penerapan prinsip good governance, kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan indeks tata kelola yang mencerminkan kualitas manajemen pemerintahan perbatasan.	1. BNPP 2. OPD Teknis	BPPD
2	Nilai Sakip	Nilai Sakip (Predikat)	$Nilai\ SAKIP = 80 + 75 + 70 + 85 + 78\ 5 = 77\ ,6$	hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dilakukan secara konsisten dan berkualitas.	penilaian dilakukan melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai pedoman KemenPAN-RB. Prosesnya meliputi pemeriksaan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Nilai dihitung dari komponen yang telah ditentukan, seperti perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Hasil penjumlahan dibagi rata sehingga menghasilkan skor akhir yang menjadi predikat SAKIP.	1.INSPEKTORAT	BPPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan maka, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan perlu menentukan program. Program yang direncanakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak **2 program 9 kegiatan 24 sub kegiatan**.

B. Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggran 2026

Program tersebut sebagaimana yang disebutkan diatas selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama I (satu) tahun kedepan periode 2026. Adapun jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

6. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
7. Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
   a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan otonomi Daerah
   b. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
8. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
   a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
   b. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
   c. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
   d. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah
   e. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota
9. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan
   a. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
   b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Berdasarkan Program-program yang telah ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, dalam kurun waktu (satu) tahun akhir periode tahun 2025-2026, perlu diturunkan dalam beberapa kegiatan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun kedepan pada setiap Program dan Kegiatan. Berikut tabel Renja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

Nama OPD :

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2026		PAGU (Rp) TAHUN 2026		KETERANGAN
					Renja	Perubahan Renja	Renja	Perubahan Renja	
	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**		**PERSENTASE UNIT KERJA INTERNAL YANG MEMPEROLEH PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**						
I.I	Perencanaan,								
I.I.1	Penyusunan	Penyusunan	jumlah dokumen	jumlah dokumen	1 dokumen	2 dokumen	18,256,000.00	-	
I.I.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	jumlah laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	4 laporan	16,426,000.00	-	
I.II	**Administrasi**								
I.II.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 org/bulan	14 org/bulan	3,624,922,136.00	3,970,224,786	
I.III	**Administrasi Umum**								
I.III.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang disediakan	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	32,540,700.00	-	
I.III.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor yang disediakan	jumlah peralatan kantor yang disediakan	7 unit	6 unit	261,607,560.00	-	

I.III.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan BMD	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan BMD	7 paket	7 paket	19,894,545.00	32,011,375	
I.III.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	9,181,455.00	-	
I.III.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan dan minum kunjungan tamu	jumlah makan dan minum kunjungan tamu	1 Laporan	1 laporan	25,043,310.00	-	
I.III.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1 Laporan	1 laporan	284,649,000.00	423,671,000	
I.IV	**Penyediaan Jasa**								
I.IV.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan ketersediaan akses komunikasi dan informasi, air bersih dan listrik	jumlah bulan ketersediaan akses komunikasi dan informasi, air bersih dan listrik	12 laporan	12 laporan	90,000,000.00	71,000,000	
I.IV.2	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	jumlah peralatan	jumlah peralatan	1 laporan	1 laporan	38,950,000.00	61,600,000	
I.IV.3	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	jumlah bulan	jumlah bulan	12 laporan	12 laporan	389,323,200.00	441,075,200	
I.V	**Pemeliharaan**								
I.V.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan/ service jumlah PKB yang dibayar tepat waktu	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan/ service jumlah PKB yang dibayar tepat waktu	1 unit	5 unit	40,669,000.00	104,198,380	

I.V.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit	145,000,000.00	-	
I.V	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**								
I.V.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	56,250,000.00	-	
II	**Program**								
II.I	**Perencanaan dan**								
II.I.1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	jumlah dokumen koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah	jumlah dokumen koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah	2 dokumen	2 dokumen	548,979,390.00	-	
II.I.2	Penyusunan	Penyusunan Rencana	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	512,084,960.00	-	
II.II	**Pelaksanaan**								
II.II.1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen	713,100,940.00	713,100,940.00	
II.II.2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan pemanfaatan kawasan perbatasan	jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan pemanfaatan kawasan perbatasan	1 kegiatan	1 kegiatan	290,161,720.000.00	290,161,720.000.00	
II.II.3	Penjagaan dan	Penjagaan dan	jumlah TANDA	jumlah TANDA	2 dokumen	-	-	-	
II.II.4	Penjagaan dan	Penjagaan dan	jumlah TANDA	jumlah TANDA	1 laporan	-	-	-	

II.II.5	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan	jumlah pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan	2 laporan	2 laporan	-	-	
II.III	**Monitoring dan**								
II.III.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	1 dokumen	1 dokumen	258,253,080.00	-	
II.III.2	Pelaporan	Pelaporan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,052,500.00	-	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang akan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan garis kebijakan umum, RENSTRA SKPD, serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Nunukan, dokumen ini menetapkan program, kegiatan, lokasi, sasaran, dan pagu indikatif sehingga terbentuk rencana kerja yang terarah dan terukur.

Demikian RENJA Perubahan Tahun 2026 ini disusun dengan harapan seluruh rangkaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan efektif, sehingga mampu meningkatkan kinerja aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kawasan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Nunukan,13 Juli 2026
Kepala Badan

ROBBY NAHAK SERANG,S.H
NIP. 19660814 199703 1 006